

RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAHAKAM ULU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan penganggaran tahun berikutnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 54 Tahun 2014, dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah selaras dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013.

Akhirnya atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak sehingga selesainya penyusunan Rancangan Akhir Renja ini diucapkan terima kasih dan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Ujoh Bilang,

Mengetahui
Kepala Dinas,



Honorata Yulita Usun, SH.,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750112 200112 2 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
BAB I	PENDAHULUAN.....	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	7
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun	9
	Lalu dan dan Capaian Renstra SKPD	
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	14
	Fungsi SKPD	
2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	15
	Masyarakat	
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan	16
	Nasional dan Provinsi	
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	16
3.3	Program dan Kegiatan	17
	Program dan Kegiatan mencakup :	
a.	Indikator Kinerja	
b.	Kelompok Sasaran	
c.	Lokasi Kegiatan	



- d. Kebutuhan Dana Indikatif
- e. Sumber Dana

BAB IV PENUTUP.....	33
---------------------	----

Lampiran :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan sudah berjalan atau terealisasi Dinsos P2PA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan belum masuk pada tahun sebelumnya
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang terlaksana pada tahun sebelumnya yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja Perubahan SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

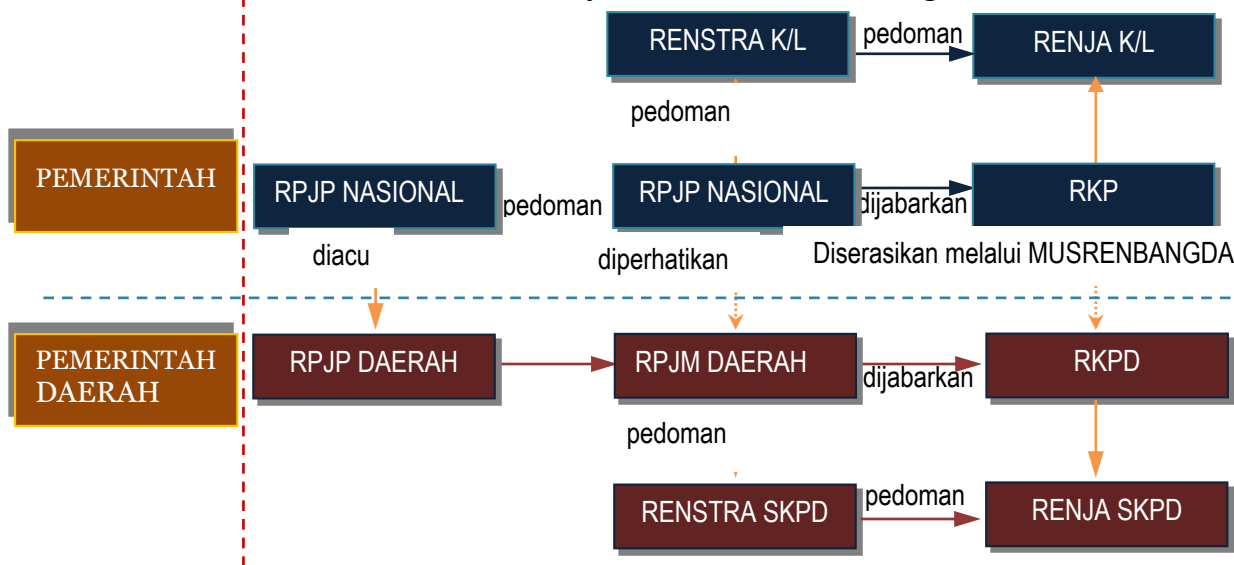
Tahap Penyajian rancangan Renja SKPD merupakan sistematika penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya.

Proses penyusunan Renja SKPD pada tingkatan SKPD secara garis besar meliputi :

- (1) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang mendorong pelaksanaan SPM.
- (2) Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana

kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA SKPD. Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh SKPD harus menyusun RENSTRA SKPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA SKPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA SKPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-SKPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal SKPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja SKPD disusun untuk mengakomodir usulan program prioritas berdasarkan hasil Musrenbang Daerah tingkat Kabupaten dengan menyelaraskan usulan kecamatan dengan SKPD Teknis yang berkaitan dalam rangka penyempurnaan RKPD dan terjaminnya konsistensi pelaksanaan RPJMD atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

1.3.2 Tujuan

Tersusunnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan tetap menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta dengan dokumen anggarannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025, meliputi :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal SKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat;
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta merumuskan Program dan Kegiatan yang didalamnya dirumuskan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, target kinerja, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana dari Program dan Kegiatan SKPD yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi program dan kegiatan;
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan dan Capaian

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu , maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Turunan Renja SKPD Triwulan Tahun 2024 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	ANGGARAN (Rp)
2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13.561.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.146.513.700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 108.498.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 17.729.300



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Rp 48.380.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	Rp 58.233.200
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Rp 1.216.733.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Rp 11.615.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Rp 60.925.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Rp 1.696.205.899
: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Rp 5.128.141.800



: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Rp 235.200.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Rp 182.742.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Rp 37.368.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Rp 41.557.700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Rp 173.081.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Penataan Organisasi	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Rp 18.684.000



PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp 54.782.800
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp 129.281.100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 1.694.972.915
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 205.572.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 212.898.900
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 405.024.300
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 147.377.700
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 192.478.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 224.255.900
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Rp 114.797.272
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/ kota	Rp 207.035.500
Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial	
: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp 3.753.781.800



: Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	122.214.215
: Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Rp	525.116.100
: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	55.738.000
: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp	51.516.000
: Pemberian Layanan Rujukan	Rp	66.152.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp	4.904.150.500
Penyediaan Makanan	Rp	359.690.000
	Rp	23.622.005.101



b. Realisasi Belanja Tahun 2024

Uraian	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran
		KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
2	3	7	8	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13.561.400	Rp 1.600.000	11,80	Rp 11.961.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.146.513.700	Rp 1.131.049.600	98,65	Rp 15.464.100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 108.498.400	Rp 104.885.000	96,67	Rp 3.613.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 17.729.300	Rp 9.061.200	51,11	Rp 8.668.100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 48.380.000	Rp 38.960.000	80,53	Rp 9.420.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Bahan/Material	Rp 58.233.200	Rp 54.708.707	93,95	Rp 3.524.493
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.216.733.000	Rp 1.204.024.899	98,96	Rp 12.708.101
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 11.615.000	Rp 3.620.000	31,17	Rp 7.995.000





PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 60.925.000	Rp 43.593.250	71,55	Rp 17.331.750
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.696.205.899	Rp 1.333.181.599	78,60	Rp 363.024.300
: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.128.141.800	Rp 3.604.518.888	70,29	Rp 1.523.622.912
: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 235.200.000	Rp 184.704.000	78,53	Rp 50.496.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 182.742.000	Rp 171.431.668	93,81	Rp 11.310.332
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 37.368.000	Rp 37.345.200	99,94	Rp 22.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 41.557.700	Rp 35.016.800	84,26	Rp 6.540.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 173.081.400	Rp 169.035.800	97,66	Rp 4.045.600



Penataan Organisasi				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp18.684.000	Rp14.700.000	78,68	Rp3.984.000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp54.782.800	Rp53.758.400	98,13	Rp1.024.400
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp129.281.100	Rp106.283.960	82,21	Rp22.997.140
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.694.972.915	Rp1.607.907.479	94,86	Rp87.065.436
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp205.572.000	Rp178.890.000	87,02	Rp26.682.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp212.898.900	Rp169.819.132	79,77	Rp43.079.768
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp405.024.300	Rp93.334.200	23,04	Rp311.690.100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp147.377.700	Rp115.561.800	78,41	Rp31.815.900
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp192.478.300	Rp97.243.400	50,52	Rp95.234.900
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp224.255.900	Rp186.330.460	83,09	Rp37.925.440
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Rp114.797.272	Rp38.081.700	33,17	Rp76.715.572
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/ kota	Rp207.035.500	Rp206.523.198	99,75	Rp512.302



Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial				
: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp 3.753.781.800	Rp 2.668.291.134	71,08	Rp 1.085.490.666
: Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 122.214.215	Rp 48.420.000	39,62	Rp 73.794.215
: Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Rp 525.116.100	Rp 135.069.940	25,72	Rp 390.046.160
: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 55.738.000	Rp 35.860.400	64,34	Rp 19.877.600
: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 51.516.000		0,00	Rp 51.516.000
: Pemberian Layanan Rujukan	Rp 66.152.000		0,00	Rp 66.152.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 4.904.150.500	Rp 2.818.222.734	57,47	Rp 2.085.927.766
Penyediaan Makanan	Rp 359.690.000	Rp 43.225.431	12,02	Rp 316.464.569
	Rp 23.622.005.101	16.744.259.979	70,88	Rp 6.877.745.122

2.1.1 Faktor-Faktor penghambat Realisasi Program dan Kegiatan

Faktor-faktor penghambat capaian program dan kegiatan Tahun 2024 antara lain:

1. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Dinsos P2PA) Tahun 2024 berjalan baik.
2. Kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya adalah :
 - 2.1 Terdapat 2 Kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial yang tidak terserapnya anggaran disebabkan adanya Kriteria atau Penerima Bantuan tidak terdapat Pada tahun Berjalan.

Tidak terealisasinya seluruhnya anggaran Tahun 2024, tidak terlalu berimplikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan alasan :

1. Kegiatan Prioritas Dinsos P2PA tetap terlaksana seluruhnya;
2. Tugas dan Fungsi Dinsos P2PA yang urgen telah berjalan sesuai ketentuan yakni tugas Sosial yang dilaksanakan melalui Program, antara lain ;
 - a. Program Bantuan dan Jaminan Sosial
 - b. Program Pemberdayaan Sosial
 - c. Program Rehabilitasi Sosial
 - d. Program penanganan Bencana

Tindak Lanjut untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target capaian program dan kegiatan :

1. Pengguna Anggaran menghimbau kepada masing-masing pelaksana Program Untuk penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan.
2. Melakukan Evaluasi terhadap seluruh PPTK untuk mengetahui kendala teknis yang dihadapi untuk menentukan metode tindak lanjutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru dalam ketentuan masih mengacu RPJMD Kabupaten Induk Namun sampai dengan saat ini belum ada kajian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu



terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA sebagai berikut :

- 1. Kegiatan-kegiatan Pemeriksaan insidentil (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Dinsos P2PA Kabupaten.
- 2. Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus Sosial,Bencana,dan Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah pusat/Pemerintah Provinsi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja pelayanan Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum Memadainya peralatan Pendukung Tagana dalam Bidang banjamsos
- b. Kurangnya Pendataan Verivali tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- c. Kurangnya Bantuan bagi Penyandang Disabilitas,Seperti Bantuan kaki/Tangan Palsu dll.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Melakukan Pendataan atau Verivali di 5 Kecamatan Kab,Mahakam Ulu
- b. Melaksanakan Kegiatan bantuan,seperti, Bencana alam dll, dengan melakukan kerjasama dengan bagian yang berkaitan, dalam urusan bantuan/bencana

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu Renja 2024 dibandingkan dengan Rancangan Awal Renja Dinsos P2PA Tahun 2025:

Renja 2024		Renja 2025	
Jumlah		Jumlah	
-	Program 10	-	Program 10
-	Kegiatan 20	-	Kegiatan 20
-	Sub Kegiatan 37	-	Sub Kegiatan 39

Pada Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat 20 Sub Kegiatan dari 11 Program Kegiatan. Hal ini disebabkan, adanya Kegiatan Prioritas yang ditetapkan di RENSTRA Dinsos P2PA Periode 2021-2026 yakni Program dan Kegiatan :

Secara keseluruhan, pengajuan Renja Dinsos P2PA TA 2025 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinsos P2PA serta program dan kegiatan yang diusulkan telah mengacu pada RPJMD yang melandasi tugas dan fungsi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, Dinsos P2PA dalam kapasitas untuk mengakomodir Program dan Kegiatan Masyarakat Tidak untuk dimasukan kedalam Rencana Kerja, akan tetapi Dinsos P2PA sesuai tugas dan fungsinya hanya menerima pengaduan masyarakat dalam rangka pengawasan yang sifatnya mendorong perbaikan dan peningkatan atas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Program Dinsos P2PA Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Kegiatan Nasional disetiap Bidang yang berkaitan dengan Kegiatan tersebut.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Penentuan tujuan dan sasaran Renja SKPD dirumuskan dengan mengacu pada penetapan visi dan misi yang kemudian diturunkan kedalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra sebagai dasar dalam penyusunan Renja atau dokumen lain yang diperlukan.

Dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran SKPD DINSOS P2PA Tahun 2025
Kabupaten Mahakam Ulu

Sumber Data : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA DAERAH TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran PadaTahun Ke-
				2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,76%



Sumber Data : INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKU-PD)

DINSOSP2PA KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN

2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-2025	Rumus Pengukuran Kinerja
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan PMKS, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Perlindungan dan jaminan Sosial	20%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	72%	$\frac{\text{Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$
2	Meningkatkan kualitas hidup, pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender serta pemenuhan hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	95%	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD}} \times 100\%$

Untuk mendukung program kerja skala prioritas dan program penunjang diatas, dibutuhkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.

Sedangkan pagu indikatif Belanja Langsung untuk masing-masing program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL KESELURUHAN KEBUTUHAN PAGU ANGGARAN				Rp 34.615.467.411,00				Rp 34.615.467.411,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
'1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 185.520.000,00				Rp 185.520.000
'1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan SKPD	MAHAKAM ULU	2 Laporan	Rp 185.520.000,00	Dana Perimbangan		2 Laporan	Rp 185.520.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 5.327.845.611,00			-	Rp 5.327.845.611



1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya ASN terkait tugas Admintratif	MAHAKAM ULU	9 Orang	Rp 240.000.000	Dana Perimbangan		9 Orang	Rp 240.000.000
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	MAHAKAM ULU	18 Orang	Rp 4.895.804.611	Dana Perimbangan		18 Orang	Rp 4.895.804.611
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Tersusnya Laporan SKPD	MAHAKAM ULU	2 laporan	Rp 22.523.000,00	Dana Perimbangan		2 laporan	Rp 22.523.000
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersunnya Laporan Keuangan	MAHAKAM ULU	3 Laporan	Rp 169.518.000,00	Dana Perimbangan		3 Laporan	Rp 169.518.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 1.959.272.600,00				Rp 1.959.272.600
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	MAHAKAM ULU	20 jenis	Rp 220.477.600	Dana Perimbangan		20 jenis	Rp 220.477.600



1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MAHAKAM ULU	5 jenis	Rp 40.000.000,00	Dana Perimbangan		5 jenis	Rp 40.000.000
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	MAHAKAM ULU	4 jenis	Rp 88.787.000	Dana Perimbangan		4 jenis	Rp 88.787.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAHAKAM ULU	30 Kali	Rp 1.524.123.000,00	Dana Perimbangan		30 Kali	Rp 1.524.123.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	MAHAKAM ULU	4 jenis	Rp 55.435.000	Dana Perimbangan		4 jenis	Rp 55.435.000
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	MAHAKAM ULU	2 jenis	Rp 30.450.000	Dana Perimbangan		2 jenis	Rp 30.450.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 137.780.000,00			-	Rp 137.780.000
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAHAKAM ULU	2 Unit mobil, 10 unit motor,	Rp 137.780.000,00	Dana Perimbangan		2 Unit mobil, 10 unit motor,	Rp 137.780.000



1.06.01.2.13	Penataan Organisasi				Rp 20.531.000,00			-	Rp 20.531.000
1.06.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusnya Laporan Kinerja	MAHAKAM ULU	1 Dokumen	Rp 20.531.000,00	Dana Perimbangan		1 Dokumen	Rp 20.531.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 1.620.472.800,00			-	Rp 1.620.472.800
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAHAKAM ULU	10 Jenis	Rp 47.440.000,00	Dana Perimbangan		10 Jenis	Rp 47.440.000
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	MAHAKAM ULU	2 jenis	Rp 15.750.000,00	Dana Perimbangan		2 jenis	Rp 15.750.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAHAKAM ULU	30 orang	Rp 1.521.882.800	Dana Perimbangan		30 orang	Rp 1.521.882.800
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MAHAKAM ULU	2 jenis	Rp 35.400.000,00	Dana Perimbangan		2 jenis	Rp 35.400.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							-	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Rp 800.238.000,00			-	Rp 800.238.000



1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perjalanan Dalam Daerah Kegiatan Pengantaran dan Penjemputan Peserta PSBR,PSKW dan Kegiatan Pendampingan Karang Taruna Kabupaten	MAHAKAM ULU	4 Orang	Rp 441.560.000,00	Dana Perimbangan		4 Orang	Rp 441.560.000
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Evaluasi TKSK dan PSM Di Dinas Sosial Kabupaten / Kota	MAHAKAM ULU	7 Orang	Rp 358.678.000,00	Dana Perimbangan		7 Orang	Rp 358.678.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial				Rp 5.337.964.000,00			-	Rp 5.337.964.000



1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada KeluargaPenyangg Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Perjadin Dalam dan luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi, Verifikasi Data Santunan, Penyaluran Bantuan, RAN HAM, Stunting, dan Perjadin SPM	MAHAKAM ULU	2.200,00	Rp 3.901.489.000,00	Dana Perimbangan		2.200,00	Rp 3.901.489.000
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang	MAHAKAM ULU	1 orang	Rp 223.212.000,00	Dana Perimbangan		1 orang	Rp 223.212.000
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	5 orang	Rp 118.600.000,00	Dana Perimbangan		5 orang	Rp 118.600.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada KeluargaPenyangg Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah data Pasangan Usia Subur (PUS)dengan status miskin dengan Masalah Kesejahteraan Sosial	MAHAKAM ULU	200 orang	Rp 138.700.000,00	Dana Perimbangan		200 orang	Rp 138.700.000
1 06 04 2.01 03	Penyedia Alat Bantu	Pembuatan Kaki Palsu,Pengukuran pembuatan Kaki Palsu dan Penjemputan	MAHAKAM ULU	2 orang	Rp 210.359.000,00	Dana Perimbangan		2 orang	Rp 210.359.000



1 06 04 2.01 02	Penyedia Sandang	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Mengunjungi Anak-Anak yang berada di Asrama Santa Theresia Santo Petrus Ujoh Bilang dan Panti di Samarinda untuk pemenuhan kebutuhan dasar	MAHAKAM ULU	40 orang	Rp 106.904.000,00	Dana Perimbangan		40 orang	Rp 106.904.000
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	500 orang	Rp 638.700.000,00	Dana Perimbangan		500 orang	Rp 638.700.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
1.06.05.201	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				Rp 158.392.000,00			-	Rp 158.392.000,00
1.06.05.201.01	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Orang	Rp 61.280.000,00	Dana Perimbangan		Orang	Rp 61.280.000
1.06.05.201.02	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Orang	Rp 72.600.000,00	Dana Perimbangan		Orang	Rp 72.600.000
1.06.05.201.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Orang	Rp 24.512.000,00	Dana Perimbangan		Orang	Rp 24.512.000



1.06.05.202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp 7.884.945.500,00			-	Rp 7.884.945.500,00
1.06.05.202.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	MAHAKAM ULU	Orang	Rp 2.327.651.500,00	Dana Perimbangan		Orang	Rp 2.327.651.500
1.06.05.202.02	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Keluarga	Rp 3.500.000.000,00	Dana Perimbangan		Keluarga	Rp 3.500.000.000
1.06.05.202.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	30 Orang	Rp 2.057.294.000,00	Dana Perimbangan		30 Orang	Rp 2.057.294.000
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							-	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp 4.194.640.000,00			-	Rp 4.194.640.000,00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/kota	MAHAKAM ULU	500 orang	Rp 731.640.000,00	Dana Perimbangan		500 orang	Rp 731.640.000,00



1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Orang	Rp 400.000.000,00	Dana Perimbangan		Orang	Rp 400.000.000,00
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Unit	Rp 2.807.000.000,00	Dana Perimbangan		Unit	Rp 2.807.000.000,00
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Orang	Rp 200.000.000,00	Dana Perimbangan		Orang	Rp 200.000.000,00
1.06.06.2.01.0006	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Orang	Rp 56.000.000,00	Dana Perimbangan		Orang	Rp 56.000.000,00
1.06.06.202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp 2.213.228.000,00			-	Rp 2.213.228.000,00



1.06.06.202.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	50 Kampung	Rp 1.413.228.000,00	Dana Perimbangan		50 Kampung	Rp 1.413.228.000,00
1.06.06.202.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Orang	Rp 800.000.000,00	Dana Perimbangan		Orang	Rp 800.000.000,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp 34.658.500,00				Rp 34.658.500,00
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	1 Dokumen	Rp 34.658.500,00	Dana Perimbangan		1 Dokumen	Rp 34.658.500,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp 2.083.108.500,00				Rp 2.083.108.500,00



2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan kabupaten/kota	MAHAKAM ULU	5 Dokumen	Rp 331.976.700,00	Dana Perimbangan		5 Dokumen	Rp 331.976.700,00
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan Layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	MAHAKAM ULU	1 Laporan	Rp 213.194.600,00	Dana Perimbangan		1 Laporan	Rp 213.194.600,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	1 Laporan	Rp 1.417.835.600,00	Dana Perimbangan		1 Laporan	Rp 1.417.835.600,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	6 Dokumen	Rp 61.426.500,00	Dana Perimbangan		6 Dokumen	Rp 61.426.500,00



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terlayani Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota\	MAHAKAM ULU	3 Orang	Rp 58.675.100,00	Dana Perimbangan		3 Orang	Rp 58.675.100,00
2.08.03.2.01	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 464.490.500,00				Rp 464.490.500,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	1 Unit	Rp 300.000.000,00	Dana Perimbangan		1 Unit	Rp 300.000.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang terlayani hasil kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	5 Orang	Rp 164.490.500,00	Dana Perimbangan		5 Orang	Rp 164.490.500,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								



2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak/Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 677.489.100,00				Rp 677.489.100,00
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	MAHAKAM ULU	1 Laporan	Rp 193.800.000,00	Dana Perimbangan		1 Laporan	Rp 193.800.000,00
2.08.04.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terlayani, hasil kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	25 Orang	Rp 164.876.000,00	Dana Perimbangan		25 Orang	Rp 164.876.000,00
2.08.04.2.01.0002	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	MAHAKAM ULU	6 Dokumen	Rp 232.994.600,00	Dana Perimbangan		6 Dokumen	Rp 232.994.600,00



	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang terlayani, kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	6 Orang	Rp 85.818.500,00	Dana Perimbangan		6 Orang	Rp 85.818.500,00
2.08.04.2.01	SOSIALISASI TENTANG POLA ASUH ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERJADINYA STUNTING				Rp 214.732.100,00				Rp 214.732.100,00
	POLA ASUH ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA UNTUK PENCEGAHAN STUNTING	Jumlah Orang yang menerima Penyuluhan tentang pencegahan Stunting	MAHAKAM ULU	5 Kecamatan	Rp 214.732.100,00	Dana Perimbangan		5 Kecamatan	Rp 214.732.100,00
02.08.06	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
2.08.06.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 508.367.000,00				Rp 508.367.000,00



	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	2 Dokumen	Rp 508.367.000,00	Dana Perimbangan		2 Dokumen	Rp 508.367.000,00
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/ Kota				Rp 491.792.200,00				Rp 491.792.200,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	5 Dokumen	Rp 223.060.100,00	Dana Perimbangan		5 Dokumen	Rp 223.060.100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	5 Dokumen	Rp 268.732.100,00	Dana Perimbangan		5 Dokumen	Rp 268.732.100,00
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								



2.08.07.2.03	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp 300.000.000,00			-	Rp 300.000.000,00
2.08.07.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	6 Dokumen	Rp 300.000.000,00	Dana Perimbangan		6 Dokumen	Rp 300.000.000,00



Usulan Rencana Program dan Kegiatan pada APBD Bertujuan untuk memenuhi Memaksimal kegiatan yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya agar dapat dimaksimal kan pada tahun selanjutnya supaya target dan sasaran pada Renstra dapat terlaksana dengan baik.

Berikut Kegiatan yang diusulkan dalam Renja

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	APBD MURNI 2025	TARGET CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 185.520.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 185.520.000,00	2 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.327.845.611,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 240.000.000	9 Orang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.895.804.611	18 Orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Rp 22.523.000,00	2 laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 169.518.000,00	3 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.959.272.600,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 220.477.600	20 jenis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 40.000.000,00	5 jenis



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp88.787.000	4 jenis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.524.123.000,00	30 Kali
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp55.435.000	4 jenis
Penyediaan Bahan/Material	Rp30.450.000	2 jenis
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp137.780.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp137.780.000,00	2 Unit mobil, 10 unit motor,
Penataan Organisasi	Rp20.531.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp20.531.000,00	1 Dokumen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.620.472.800,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp47.440.000,00	10 Jenis
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp15.750.000,00	2 jenis
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.521.882.800	30 orang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp35.400.000,00	2 jenis
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp800.238.000,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp441.560.000,00	4 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp358.678.000,00	7 Orang
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		



Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp5.337.964.000,00	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada KeluargaPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp3.901.489.000,00	2.200,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp223.212.000,00	1 orang
Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Rp118.600.000,00	5 orang
Pemberian Bimbingan Sosial kepada KeluargaPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp138.700.000,00	200 orang
Penyedia Alat Bantu	Rp210.359.000,00	2 orang
Penyedia Sandang	Rp106.904.000,00	40 orang
Penyediaan Permakanan	Rp638.700.000,00	500 orang
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp158.392.000,00	
Rujukan Anak-anak Terlantar	Rp61.280.000,00	Orang
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp72.600.000,00	Orang
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Rp24.512.000,00	Orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.884.945.500,00	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.327.651.500,00	Orang
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp3.500.000.000,00	Keluarga



Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp2.057.294.000,00	30 Orang
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp4.194.640.000,00	
Penyediaan Makanan	Rp731.640.000,00	500 orang
Penyediaan Sandang	Rp400.000.000,00	Orang
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp2.807.000.000,00	Unit
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp200.000.000,00	Orang
Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp56.000.000,00	Orang
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp2.213.228.000,00	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp1.413.228.000,00	50 Kampung
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp800.000.000,00	Orang
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp34.658.500,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp34.658.500,00	1 Dokumen
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.083.108.500,00	



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp331.976.700,00	5 Dokumen
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp213.194.600,00	1 Laporan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.417.835.600,00	1 Laporan
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp61.426.500,00	6 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp58.675.100,00	3 Orang
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp464.490.500,00	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp300.000.000,00	1 Unit
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp164.490.500,00	5 Orang
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp677.489.100,00	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp193.800.000,00	1 Laporan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp164.876.000,00	25 Orang



Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	Rp	232.994.600,00	6 Dokumen
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	85.818.500,00	6 Orang
SOSIALISASI TENTANG POLA ASUH ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERJADINYA STUNTING	Rp	214.732.100,00	
POLA ASUH ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA UNTUK PENCEGAHAN STUNTING	Rp	214.732.100,00	5 Kecamatan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	508.367.000,00	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	508.367.000,00	2 Dokumen
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota	Rp	491.792.200,00	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	223.060.100,00	5 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	268.732.100,00	5 Dokumen
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	300.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	300.000.000,00	6 Dokumen

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan dokumen yang secara substansial adalah penerjemahan dari tugas pokok dan fungsi Dinsos P2PA yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Disamping itu, Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam Aplikasi SIPD serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA APBD) tahun 2025 dan akan melalui Proses Rasionalisasi Renja yakni proses Rancangan Akhir Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) APBD SKPD ini merupakan gambaran program dan kegiatan Prioritas Dinsos P2PA Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada tahun selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA APBD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu ini dibuat sebagai pedoman , sehingga kedepan diharapkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi optimal.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Ujoh Bilang,

Mengetahui
Kepala Dinas,



Honorata Yulita Usun, SH.,M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750112 200112 2 002